

# Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Implikasinya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Survey Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung)

**Eriani Sania Putri<sup>1</sup>, Ahmad Syarief<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung 40012

E-mail : eriani.sania.amp17@polban.ac.id

<sup>2</sup>Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung 40012

E-mail : ahmadsyarief\_polban@yahoo.com

## ABSTRAK

Pengelolaan keuangan di lingkungan Instansi Pemerintah Kota Bandung dinilai masih belum optimal. Hal ini dibuktikan melalui masih banyaknya beberapa permasalahan pengelolaan keuangan khususnya pada sumber pendapatan daerah. Penyebab terjadinya hal tersebut dapat timbul karena kompetensi sumber daya manusia yang belum memadai. Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan daerah dan implikasinya pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Populasi penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota Bandung. Sampel penelitian ini ditentukan dengan teknik *non-probability sampling* serta menggunakan pendekatan *purposive sampling* sebanyak 12 OPD yang memiliki sumber pendapatan dengan jumlah responden sebanyak 60 pegawai. Metode analisis data yang digunakan ialah uji hipotesis dan analisis jalur serta uji sobel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, adanya pengaruh mediasi yang signifikan dari kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, melalui pengelolaan keuangan daerah.

### Kata Kunci

*Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Keuangan Daerah, Kinerja Keuangan*

## 1. PENDAHULUAN

Sumber pendapatan merupakan salah satu hal terpenting dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah oleh karena itu pemerintah daerah perlu mencari cara agar mendapatkan sumber pendapatan lain yang dapat diperoleh dari wilayahnya serta dapat diandalkan sebagai tulang punggung pendapatan suatu daerah. Berikut ini merupakan data perkembangan pendapatan asli daerah Kota Bandung selama lima tahun terakhir, sebagai berikut:

**Tabel 1 Target dan Realisasi PAD  
Pemerintah Kota Bandung TA. 2015 – 2019**

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2015	Rp. 2.066.246.830.526	Rp. 1.859.694.643.505	90,00%
2016	Rp. 2.767.404.903.364	Rp. 2.152.755.704.962	77,79%
2017	Rp. 3.015.836.590.302	Rp. 2.578.457.420.885	85,50%
2018	Rp. 3.397.309.517.811	Rp. 2.571.591.786.199	75,69%
2019	Rp. 3.252.540.610.057	Rp. 2.548.258.990.275	78,35%

Dari table 1 terlihat bahwa presentase yang dihasilkan pendapatan asli daerah dari 2015-2019 belum maksimal sebab pengelolaan keuangan setiap tahunnya tidak mencapai target pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan. Ade Supriadi menjelaskan bahwa tidak tercapainya target tersebut, dikarenakan gagalnya upaya pengelolaan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah [1]. Hal ini sesuai dengan [2] yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kota Bandung masih dinyatakan belum optimal baik berupa penyerapan sumber pendapatan maupun pengelolaan potensi yang dimiliki oleh pendapatan asli daerah. Selain itu, masih terdapat beberapa permasalahan khususnya pada sumber daya manusia dari Bendahara Pengeluaran BLUD, BPP, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Dana BOS pada OPD terkait yang tidak cermat dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, prasarana sarana yang belum mencukupi, dan penggunaan mesin parkir masih belum optimal. Berdasarkan [3] menyatakan bahwa banyaknya pengaduan yang telah

dilakukan oleh masyarakat meningkat hingga penghujung akhir tahun 2019, salah satu objek permasalahan yang diadukan lebih berfokus pada pelayanan kinerja dari pemerintah daerah. Pelayanan untuk masyarakat nyatanya masih dinilai kurang memuaskan dalam menangani permasalahan yang ada. Faktor lainnya ialah kinerja yang dimiliki masih tidak sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, maupun tidak sesuai dengan kualifikasi yang tersedia.

Kompetensi sumber daya manusia juga memiliki keterlibatan dalam penyusunan laporan keuangan karena adanya keterbatasan pengetahuan menjadi latar belakang permasalahan kurangnya pemahaman atau penguasaan dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar.

Dalam rangka meningkatkan kualitas ekonomi dan sumber daya manusia di suatu daerah, salah satu yang harus dicapai adalah kinerja pemerintah yang baik. Menurut [4] Kinerja ialah hasil kerja yang mampu dicapai oleh seorang individu maupun kelompok sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab dalam upaya pencapaian tujuan dari sumber daya manusia tersebut. [5] menjelaskan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan mengukur tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang telah ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Tujuan dari dilakukannya pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah menurut [6] yaitu untuk memperbaiki kinerja pemerintah, membantu dalam mengalokasikan pengelolaan sumber daya serta pembuatan keputusan, dan mewujudkan pertanggungjawaban publik serta memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Penelitian [7] mengemukakan permasalahan serupa bahwa penggunaan sumber dana Kota Cimahi masih belum maksimal dalam melaksanakan kegiatan, sehingga tidak sesuai dengan rumusan proses kegiatan yang telah ditetapkan dengan begitu dapat terlihat bahwa pengelolaan keuangan Kota Cimahi masih kurang optimal. Selain itu, terbatasnya pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan pada bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman atau penguasaan dari aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar. Menurut Penelitian [8] hasil yang diperoleh membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang efektif, maka sumber daya manusia pemerintah daerah pun harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya. Hal ini menyebabkan sumber daya manusia menjadi komponen utama yang berfungsi sebagai motor penggerak dalam menjalankan pemerintahan. Hasil penelitian lain dilakukan oleh [9] menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah

berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini menandakan bahwa pengelolaan keuangan daerah ditingkatkan maka dapat mendorong kinerja keuangan. Selain itu, [10] menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja keuangan publik pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang. Artinya jika kompetensi ditingkatkan dengan baik maka kinerja keuangan publik juga meningkat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Implikasinya pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Survey pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung).

Berikut rumusan masalah yang dapat diidentifikasi berdasarkan latar belakang ini yaitu :1) Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan daerah di OPD Kota Bandung? 2) Bagaimana pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di OPD Kota Bandung? 3) Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di OPD Kota Bandung? 4) Bagaimana pengaruh dari kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja keuangan daerah melalui pengelolaan keuangan daerah sebagai variabel intervening di OPD Kota Bandung?

Berdasarkan dengan melihat rumusan masalah terdapat tujuan penelitian yang akan dicapai sebagai berikut:1) Mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan daerah di OPD Kota Bandung 2) Mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di OPD Kota Bandung 3) Mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di OPD Kota Bandung 4) Mengetahui pengaruh dari kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja keuangan daerah melalui pengelolaan keuangan daerah sebagai variabel intervening di OPD Kota Bandung.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan [11] menjelaskan bahwa kompetensi adalah karakteristik seseorang yang berkaitan dengan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menjalankan tugasnya serta sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan begitu, dapat dilihat bahwa kompetensi memiliki hubungan yang berkaitan dengan kinerja dari sumber daya manusia suatu organisasi. [12] menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan komponen terpenting pada suatu organisasi karena adanya potensi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. [13] menegaskan bahwa sumber daya manusia salah

satu faktor penting untuk organisasi, dikarenakan sumber daya manusia merupakan ikatan dari kecerdasan, keahlian dan keterampilan yang menjadi ciri khas dari organisasi tersebut. Sumber daya manusia yang berkualitas tentunya dijadikan tolak ukur untuk lebih mengetahui bagaimana sumber daya yang berkualitas. Menurut [14] terdapat beberapa karakteristik dari kompetensi dasar yang dimiliki oleh setiap individu, yaitu: Watak, Motif, Konsep Diri, Pengetahuan, dan Keterampilan.

## 2.2 Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam [15] menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan rangkaian kegiatan yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Selain itu, menurut [16] menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara dan bagian dari elemen-elemen pokok yang ada didalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut [17] menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan memiliki prinsip-prinsip yang dibutuhkan dalam mengawasi kebijakan keuangan daerah. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah ialah: Akuntabilitas, Kejujuran, Transparansi, Pengendalian, dan *Value for money*.

## 2.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja pemerintah daerah tidak hanya berfokus bagaimana pencapaian kegiatan/program, tetapi memiliki prioritas lain seperti kinerja keuangan pemerintah daerah. [18] mengatakan bahwa kinerja keuangan daerah merupakan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah untuk menggali, mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber keuangan asli milik daerah itu sendiri, dengan begitu dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan disuatu daerah dan dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat akan adanya kebebasan penuh dalam menggunakan/memanfaatkan dana-dana bagi kepentingan masyarakat daerah dalam batasan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut [19], indikator kinerja merupakan alat ukur yang biasanya digunakan untuk menentukan seberapa sukses organisasi dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Berikut ini merupakan jenis indikator kinerja dari pemerintah daerah [20] : Masukan (*Input*), Proses (*Process*), Keluaran (*Output*), Hasil (*Outcome*) dan Manfaat (*Benefit*).

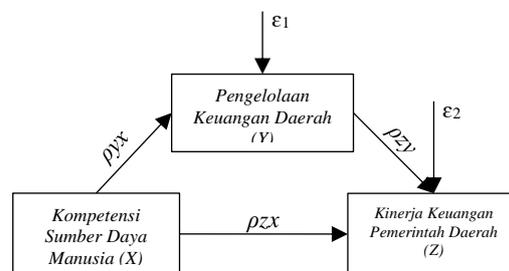
## 2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, berikut ini merupakan hipotesis yang diajukan oleh penulis:

1. H<sub>1</sub>: Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan daerah.
2. H<sub>2</sub>: Pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. H<sub>3</sub>: Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
4. H<sub>4</sub>: Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui pengelolaan keuangan daerah.

## 3. METODE PENELITIAN

Populasi dalam melaksanakan penelitian ini ialah seluruh OPD di Kota Bandung yang berjumlah 60 OPD. Penelitian ini menggunakan teknik sampel berdasarkan metode *non-probability sampling* dan *purposive sampling* sebagai pendekatan yang akan digunakan. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bandung yang memiliki status sebagai dinas dan badan, pemilihan kriteria ini disesuaikan dengan [21] yang menyatakan bahwa dinas dan badan merupakan perangkat daerah yang bertugas untuk melaksanakan fungsi serta urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan, sehingga kemampuan kerjanya mudah diukur melalui pencapaian kinerja serta program kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu, kriteria lainnya merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bandung yang menghasilkan sumber penerimaan berupa pendapatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan metode vertifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Kemudian salah satu sumber data akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer yang didapatkan secara langsung dari subyek penelitian berupa kuesioner. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel bebas terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagai variabel *intervening*, dan implikasinya pada kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variabel terikat yang selanjutnya data tersebut dikumpulkan serta dianalisis menggunakan metode analisis jalur. Diagram analisis jalur ditunjukkan dengan Gambar 1 sebagai berikut.



Gambar 2 Diagram Analisis Jalur

Selain itu terdapat 2 (dua) model rancangan untuk pengujian hipotesis. Model pertama ialah substruktur 1 yang meregresikan dan menghitung koefisien jalur dari variabel kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya ialah model

kedua yaitu substruktur 2 yang meregresikan dan menghitung koefisien jalur dari variabel kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kemudian, menghitung bagaimana pengaruh langsung, tidak langsung dan pengaruh total antar variabel serta menguji dengan uji Sobel untuk melihat signifikansi dari pengaruh mediasi yang ada. Berikut ini merupakan rumus uji Sobel :

$$Sp_{yx \cdot p_{zy}} = \sqrt{(p_{zy}^2 Sp_{yx}^2) + (p_{yx}^2 Sp_{zy}^2) + (Sp_{yx}^2 Sp_{zy}^2)}$$

Dari hasil perhitungan rumus di atas, selanjutnya harus menghitung nilai t statistik pengaruh mediasi dengan rumus yang ada dibawah ini:

$$t_{hitung} = \frac{P_{yx \cdot P_{zy}}}{SP_{yx \cdot P_{zy}}}$$

Nilai dari  $t_{hitung}$  tersebut dibandingkan dengan nilai  $t_{tabel}$ . Apabila nilai  $t_{hitung} >$  nilai  $t_{tabel}$  maka dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya pengaruh mediasi secara signifikan. Begitu pula sebaliknya, Apabila nilai  $t_{hitung} <$  nilai  $t_{tabel}$  maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak adanya pengaruh mediasi secara signifikan [22]

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Berikut ini merupakan hasil perhitungan dari pengujian model substruktur 1.

**Tabel 2 Hasil Perhitungan Substruktur 1**

Variabel/Koefisien/Konstanta	Nilai	$t_{hitung}$	Sig	$t_{tabel}$
Pengelolaan Keuangan Daerah	-	3,876	0,000	2,0017
Koefisien Regresi ( $p_{yx}$ )	0,454			
Koefisien Determinasi ( $R^2$ )	0,206			
Standard Error ( $e$ ) = $\sqrt{1 - R^2}$	0,891			

Sesuai dengan data pada Tabel 2 menyatakan bahwa nilai koefisien regresi yang didapatkan sebesar 0,454 yang memiliki artian jika terjadi peningkatan kompetensi sumber daya manusia maka akan mengakibatkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin optimal begitu pula sebaliknya. Adapun koefisien regresi persamaan tersebut bernilai positif yang menandakan bahwa pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan daerah bersifat positif. Disamping itu jika melihat nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,206 atau 20,6% menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia dapat menjelaskan variabel pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan sisanya sebesar 0,794 atau 79,4% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diamati oleh peneliti. Selanjutnya, untuk melihat ada tidaknya pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan daerah dengan melakukan perhitungan uji t. Adapun nilai  $t_{tabel}$  pada

tingkat kekeliruan 5%, tingkat kepercayaan 95% dari derajat kebebasan ( $df$ ) =  $n-2 = 60-2 = 58$  maka diperoleh nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2,0017. Berdasarkan dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,876 sehingga nilai  $t_{hitung} >$   $t_{tabel}$  dan nilai signifikan  $<$  0,05 yakni 0,000. Maka  $H_0$  ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa **kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah**. Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat mendukung penelitian dari [23] yang menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh pada pengelolaan keuangan daerah. Hal ini didasarkan pada pemikiran dimana sumber daya manusia merupakan salah satu aset yang memiliki pengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan suatu instansi. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas, tentunya akan mampu meningkatkan pengelolaan keuangan dengan lebih baik. Selain itu, Penelitian [8] pun menyatakan bahwa adanya pengaruh kompetensi aparat pengelolan keuangan yang berkompentensi maka pengelolaan keuangan daerah akan berjalan efektif.

##### 4.2 Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berikut ini merupakan hasil perhitungan dari pengujian model substruktur 2.

**Tabel 3 Hasil Perhitungan Substruktur 2**

Variabel/Koefisien/Konstanta	Nilai	$t_{hitung}$	Sig	$t_{tabel}$
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	-	-	-	2,0017
Koefisien Regresi ( $p_{zx}$ )	0,306	2,754	0,008	
Koefisien Regresi ( $p_{zy}$ )	0,467	4,200	0,000	
Koefisien Determinasi ( $R^2$ )	0,441	-	-	
Standard Error ( $e$ ) = $\sqrt{1 - R^2}$	0,747	-	-	

Sesuai dengan data pada Tabel 3 menyatakan bahwa nilai koefisien regresi ( $p_{zx}$ ) dan ( $p_{zy}$ ) masing-masing sebesar 0,306 dan 0,467 yang memiliki artian jika terjadi peningkatan kompetensi sumber daya manusia maka akan mengakibatkan peningkatan pula terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan apabila pengelolaan keuangan daerah meningkat maka kinerja keuangan pemerintah daerah mengalami peningkatan. Adapun koefisien regresi persamaan tersebut bernilai positif yang menandakan bahwa pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah bersifat positif. Sedangkan jika melihat nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,441 atau 44,1% menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia dan variabel pengelolaan keuangan daerah dapat menjelaskan variabel kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan sisanya sebesar 0,559 atau 55,9% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diamati oleh peneliti. Selanjutnya, untuk melihat ada

tidaknya pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan melakukan perhitungan uji t. Adapun nilai  $t_{tabel}$  pada tingkat kekeliruan 5%, tingkat kepercayaan 95% dari derajat kebebasan (df) =  $n-2 = 60-2 = 58$  maka diperoleh nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2,0017. Berdasarkan dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 4,200 sehingga nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan nilai signifikan  $< 0,05$  yakni 0,000. Maka  $H_0$  ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa **pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah**. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari [9] yang menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan memiliki pengaruh erat dengan kinerja keuangan. Karena dengan pengelolaan keuangan yang baik maka akan memberikan kontribusi positif pada kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar [24].

#### 4.3 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Selain itu, untuk menjawab hipotesis yang telah dijabarkan maka perlu melihat ada tidaknya pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan melakukan perhitungan uji t. Adapun nilai  $t_{tabel}$  pada tingkat kekeliruan 5%, tingkat kepercayaan 95% dari derajat kebebasan (df) =  $n-2 = 60-2 = 58$  maka diperoleh nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2,0017. Berdasarkan dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,754 sehingga nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan nilai signifikan  $< 0,05$  yakni 0,008. Maka  $H_0$  ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa **kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah**. Hasil penelitian ini memiliki hal serupa dengan penelitian dari [10] yang menyimpulkan adanya hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pengalaman yang dimiliki oleh sumber daya manusia maka akan mengurangi tingkat kesalahan dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga akan meningkatkan kinerja keuangan yang efisien dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat [25].

#### 4.4 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah melalui Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan tabel 2 dan 3, maka dapat dihitung nilai dari pengaruh langsung, tidak langsung dan pengaruh total antar variabel yakni sebagai berikut.

- Menentukan pengaruh langsung (*direct effect*)  
 $DE_{X \rightarrow Z} = p_{zx} = 0,306$
- Menentukan pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) melalui Y  
 $IE_{X \rightarrow Z} = (p_{yx}) \times (p_{zy}) = 0,454 \times 0,467 = 0,212$
- Pengaruh total kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah  
 $DE + IE = 0,306 + 0,212 = 0,518$

Berdasarkan perhitungan diatas dapat diketahui bahwa pengaruh tidak langsung (mediasi) dari kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui pengelolaan keuangan daerah ialah sebesar 21,2 %. Namun alangkah lebih baiknya jika pengaruh mediasi tersebut diuji terlebih dahulu untuk melihat signifikan atau tidaknya pengaruh antar variabel dengan menggunakan uji sobel. Berikut merupakan hasil perhitungan dari Uji Sobel secara manual:

$$Sp_{yx.pzy} = \sqrt{(p_{zy}^2 Sp_{yx}^2) + (p_{yx}^2 Sp_{zy}^2) + (Sp_{yx}^2 Sp_{zy}^2)}$$

$$Sp_{yx.pzy} = \sqrt{(0,467)^2 \cdot (0,145)^2 + (0,454)^2 \cdot (0,093)^2 + (0,145)^2 \cdot (0,093)^2}$$

$$Sp_{yx.pzy} = 0,08093122842$$

Dengan demikian perhitungan  $Sp_{yx.pzy}$ , maka dapat diketahui juga nilai dari  $t_{hitung}$  dengan cara sebagai berikut:

$$t_{hitung} = \frac{p_{yx} \cdot p_{zy}}{Sp_{yx.pzy}} = \frac{(0,454) \cdot (0,467)}{0,08093122842} = 2,619$$

Adapun nilai  $t_{tabel}$  pada tingkat kekeliruan 5%, tingkat kepercayaan 95% dari derajat kebebasan (df) =  $n-2 = 60-2 = 58$  maka diperoleh nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2,0017. Berdasarkan dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,619 maka  $H_0$  ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi mediasi yang signifikan dari kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, melalui pengelolaan keuangan daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat meningkat apabila dikelola oleh sumber daya manusia yang kompeten pada bidangnya. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah pun perlu ditingkatkan untuk terus mengoptimalkan hasil sumber penerimaan pemerintah daerah. Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh [17] bahwa salah satu tujuan pengelolaan keuangan daerah yaitu Menciptakan acuan dasar dalam alokasi penerimaan negara dari daerah guna untuk memberdayakan serta meningkatkan perekonomian daerah

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis yang telah dijelaskan serta dari analisis hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, adanya pengaruh mediasi yang signifikan dari kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, melalui pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan yang optimal dapat membantu pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi sumber penerimaan daerah dan dapat meningkatkan kinerja keuangan pada instansi pemerintah daerah Kota Bandung. Dengan begitu, pengelolaan keuangan daerah diharapkan dalam penyelenggaraannya dapat didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten pada bidangnya masing-masing terutama pada bidang yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah untuk menunjang potensi penerimaan daerah.

Selanjutnya, hasil dari penelitian ini bisa menjadi referensi maupun sebagai acuan untuk peneliti selanjutnya. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat merubah ataupun menambahkan variabel independen lainnya yang tidak digunakan pada penelitian ini guna untuk melihat pengaruh antar variabel lainnya, selain itu dapat memperluas pengambilan sampel populasi penelitian dan melakukan wawancara untuk memperdalam pemahaman mengenai analisis penelitian yang diteliti.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Rizal, M. (2020, Juni 17). *Waduh, Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tekor*. Retrieved from Jabar News: <<https://jabarnews.com/read/86920/waduh-pendapatan-asli-daerah-kota-bandung-tekor>>
- [2] Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kota Bandung Tahun 2019*. Bandung: Sekertariat Daerah.
- [3] Pemerintah Daerah Kota Bandung. (2019). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2019*. Bandung: Sekertariat Daerah.
- [4] Afandi, P. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep dan Indikator)*. Riau: Zanafa Publishing.
- [5] Sari, I. P. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kab/Kota Pulau Sumatera). *JOM Fekon*, 679-692.
- [6] Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- [7] Fatimah, N. P. (2018). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Survey pada SKPD Pemerintah Kota Cimahi)*. Universitas Pasundan : Skripsi. Tidak Diterbitkan.
- [8] Simatupang, M. S., Ratnawati, V., & Susilatri, S. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 411-425.
- [9] Nasution, D. A. (2018). Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 149-162.
- [10] Hatijah, H., Mas'ud, M., & Nurpadillah, N. (2019). Pengaruh Kompetensi, Motivasi dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Keuangan Publik pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 62-69.
- [11] Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- [12] Listiyani, S., & Gunawan, A. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Industrial Research Workshop and National Seminar*, 814-819.
- [13] Hossain, M. U., & Roy, I. (2016). Human Capital Management : The New Competitive Approach. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 1020-1034.
- [14] Moehersono. (2014). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [15] Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- [16] Renyowijoyo, M. (2013). *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media
- [17] Sholeh, C., & Rochmansjah, H. (2010). Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Bandung: Fokusmedia.
- [18] Rahmawati, N. E., & Putra, I. W. (1767-1795). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012. *E-Jurnal Akuntansi*, 2016.
- [19] Pratolo, S., & Bambang, J. (2017). *Akuntansi Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: LP3M.
- [20] Mahsun, M. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- [21] Pemerintah Daerah Kota Bandung. (2016). *Peraturan Daerah Kota Bandung No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung*. Bandung: Sekretariat Daerah.
- [22] Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi ke Sembilan Cetakan ke Sembilan*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- [23] Tanzerina, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sebagai Variabel Moderating. JOM Fekon Vol.4  
No.1, 586-600.

- [24] Anisatul, L. (2017). Pengaruh Pengawasan Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Survey pada DPPKAD Kabupaten Karanganyar). The 4th Call For Syariah Paper (SANCALL)

- [25] Siregar, M. (2019). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dimediasi Dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah. Jurnal Ilmiah Magister Manajemen, 160-169.